

Manajemen Pembangunan Kota Pintar: Sinergi Teknologi, Kebijakan Publik, dan Kearifan Lokal

Muhammad Rafieq Adi Pradana¹, Nanda Pramana Putra²

¹Program Magister Manajemen, Universitas Saburai, ²Program Manajemen STIE Krakatau
mrafieq@gmail.com¹, nandapramana24@gmail.com²

Abstract

The development of smart cities is a crucial strategy for improving urban governance efficiency through the utilization of information and communication technology (ICT). However, its implementation in Indonesia still faces various challenges, particularly related to digital infrastructure readiness, unintegrated regulations, and social disparities due to digital transformation. This study aims to analyze the management of smart city development by highlighting the synergy between technology, public policy, and local wisdom as key factors for its success. This research employs a qualitative method with a secondary data analysis approach. The findings indicate that some cities, such as Yogyakarta and Semarang, have successfully adopted smart city concepts based on local wisdom, while other cities, such as Palangkaraya and Tanjung Pinang, still struggle with policy integration and infrastructure challenges. The study emphasizes that an effective smart city development strategy should include clear regulations, enhanced digital literacy among citizens, and collaboration between the government, private sector, academia, and local communities. The integration of technology with social and cultural values is key to achieving an inclusive and sustainable smart city implementation.

Keywords : Smart city, Public Policy, Digital Technology, Local Wisdom, Urban Governance

Abstrak

Pembangunan kota pintar (*smart city*) merupakan strategi penting dalam meningkatkan efisiensi tata kelola perkotaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Namun, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan infrastruktur digital, regulasi yang belum terintegrasi, serta kesenjangan sosial akibat transformasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pembangunan *smart city* dengan menyoroti sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal sebagai faktor utama keberhasilannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa kota seperti Yogyakarta dan Semarang telah berhasil mengadopsi konsep *smart city* berbasis kearifan lokal, sementara kota lain seperti Palangkaraya dan Tanjung Pinang masih menghadapi tantangan integrasi kebijakan dan infrastruktur. Studi ini menegaskan bahwa strategi pembangunan kota pintar yang efektif harus mencakup regulasi yang jelas, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal. Integrasi teknologi dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal menjadi kunci keberhasilan implementasi *smart city* yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Kota Cerdas, Kebijakan Publik, Teknologi Digital, Kearifan Lokal, Tata Kelola Perkotaan

1. PENDAHULUAN

Pembangunan kota pintar (*smart city*) merupakan konsep yang semakin mendapat perhatian dalam pengelolaan perkotaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Konsep ini mengedepankan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, efektivitas tata kelola kota, serta keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung pembangunan kota pintar, termasuk dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara (Sutanto, 2022). Pemindahan ini tidak hanya menuntut

kesiapan infrastruktur, tetapi juga kesiapan sosial dan budaya masyarakat setempat, yang akan menghadapi perubahan akibat urbanisasi dan migrasi penduduk.

Implementasi konsep *smart city* di berbagai kota di Indonesia menunjukkan variasi dalam tingkat kesiapan dan keberhasilannya. Studi kasus di Kota Tanjung Pinang mengungkap bahwa masih terdapat fragmentasi dalam implementasi kebijakan *smart city* akibat kurangnya integrasi antara sektor publik dan swasta (Sholeh et al., 2024). Hal serupa terjadi di Kota Palangkaraya, yang meskipun telah mendapatkan pendampingan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, tetap menghadapi tantangan dalam efektivitas dan pemerataan pelaksanaan *smart city* (Ningsih, 2024). Kota Yogyakarta, di sisi lain, berhasil mengadopsi pendekatan *smart city* dengan mempertahankan kearifan lokal, menjadikannya sebagai salah satu contoh penerapan konsep kota pintar yang berbasis budaya (Rilansari & Saputri, 2022).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi *smart city*. Kearifan lokal berperan penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberterimaan masyarakat terhadap teknologi, sebagaimana ditunjukkan dalam studi tentang smart tourism di Semarang dan konsep smart village yang diterapkan di berbagai desa di Indonesia (Aulia et al., 2024; Sulistyowati et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai elemen tersebut dalam strategi pembangunan kota pintar di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan strategi manajemen pembangunan kota pintar yang tidak hanya berbasis pada teknologi, tetapi juga memperhatikan dimensi kebijakan publik dan kearifan lokal. Tanpa adanya sinergi yang kuat antara ketiga aspek tersebut, implementasi *smart city* berisiko mengalami hambatan, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, fragmentasi kebijakan, serta potensi konflik sosial akibat kesenjangan digital dan ekonomi.

Selain itu, pembangunan kota pintar juga harus selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan. Konsep *smart city* yang diterapkan di berbagai kota di Indonesia masih menghadapi tantangan terkait efektivitas regulasi, integrasi sistem, serta kesiapan masyarakat dalam mengadopsi perubahan teknologi (Saputra et al., 2023). Oleh karena itu, kajian ini penting untuk mengidentifikasi strategi optimal dalam mengelola pembangunan kota pintar yang berbasis pada kolaborasi *multi-stakeholder* dan pendekatan inklusif.

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi manajemen pembangunan kota pintar yang efektif dengan mempertimbangkan sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi konsep *smart city* di berbagai kota di Indonesia.
3. Merumuskan model pengelolaan kota pintar yang berbasis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi guna mencapai pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis kebijakan publik, studi kasus implementasi *smart city* di beberapa kota di Indonesia, serta evaluasi terhadap keberhasilan model yang telah diterapkan di tingkat nasional dan internasional. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji berbagai kebijakan yang telah diterapkan serta mengevaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan tata kelola perkotaan.

Penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi *smart city*, seperti kesiapan infrastruktur digital, partisipasi masyarakat, dan peran kearifan lokal dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Selain itu, penelitian ini akan membandingkan strategi yang diterapkan di berbagai kota dengan model kota pintar yang telah sukses di tingkat global untuk mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai praktik

terbaik dan beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji implementasi *smart city* di Indonesia dengan berbagai pendekatan. Sutanto (2022) menyoroti pentingnya kesiapan sosial dan budaya dalam mendukung transformasi digital di IKN Nusantara. Sholeh et al. (2024) dan Ningsih (2024) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi *smart city* sangat bergantung pada regulasi yang kuat serta kolaborasi antar pemangku kepentingan. Studi lain di Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa integrasi teknologi dengan budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas dan keberterimaan masyarakat terhadap kebijakan *smart city* (Wibisono & Handoko, 2020).

Dalam konteks pembangunan desa, konsep *smart village* menjadi bagian integral dari transformasi digital yang berkelanjutan. Sanur (2023) menyoroti peran desa dalam pembangunan yang berbasis pada kemandirian dan inovasi, sementara Hayati (2021) mengidentifikasi pentingnya sinergi antara ekonomi kreatif, BUMDes, dan desa pintar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Berdasarkan berbagai studi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan kota pintar yang sukses membutuhkan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek teknologi, kebijakan publik, serta budaya dan sosial. Penelitian ini akan memperluas kajian sebelumnya dengan menawarkan perspektif yang lebih integratif serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan *smart city* di Indonesia. Dalam pengelolaan kota pintar.

Pendekatan manajemen pembangunan kota pintar harus mengedepankan sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal. Dengan mempertimbangkan berbagai tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi kebijakan yang lebih efektif untuk mewujudkan kota pintar yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis data sekunder untuk mengeksplorasi strategi manajemen pembangunan kota pintar melalui sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal. Kajian ini berfokus pada analisis kebijakan, studi literatur, dan tinjauan konseptual terhadap implementasi *smart city* di beberapa kota di Indonesia.

Studi ini akan mengevaluasi berbagai model penerapan konsep *smart city* di Indonesia, seperti di IKN Nusantara, Kota Tanjung Pinang, Palangkaraya, Yogyakarta, Semarang, dan Banjarmasin, dengan membandingkan praktik terbaik yang ada serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Dimensi Teknologi: Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun kota pintar.
2. Dimensi Kebijakan Publik: Peran regulasi dan strategi kebijakan dalam mendukung implementasi kota pintar.
3. Dimensi Kearifan Lokal: Integrasi nilai-nilai budaya dan sosial dalam konsep *smart city*.
4. Studi Kasus Implementasi: Kota-kota yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:
 - IKN Nusantara (Sutanto, 2022)
 - Kota Tanjung Pinang (Sholeh et al., 2024)
 - Kota Palangkaraya (Ningsih, 2024)
 - Kota Yogyakarta (Rilansari & Saputri, 2022; Wibisono & Handoko, 2020)
 - Kota Semarang (Aulia et al., 2024)
 - Kota Banjarmasin (Pratama & Maulida, 2021)

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari literatur akademik berupa jurnal ilmiah tentang hasil penelitian terdahulu terkait *smart city*. Penelitian

ini dilakukan melalui analisis dokumen dan literatur yang diperoleh dari berbagai sumber nasional dan internasional. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi literatur, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Dokumen: Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan penelitian, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan kajian kebijakan.
2. Seleksi Data: Memilih sumber data yang sesuai dengan topik penelitian, mengutamakan data dari sumber terpercaya dan terbaru (2020-2024).
3. Analisis Kualitatif: Melakukan interpretasi dan pemetaan data berdasarkan tema utama penelitian.

Variabel penelitian yang digunakan dalam kajian ini meliputi:

1. *Smart city*: Konsep pembangunan kota berbasis teknologi dan data untuk meningkatkan layanan publik dan efisiensi tata kelola kota.
2. Teknologi *Smart city*: Pemanfaatan teknologi digital, *Internet of Things (IoT)*, *big data*, dan kecerdasan buatan dalam mendukung pembangunan kota pintar.
3. Kebijakan Publik: Regulasi dan strategi pemerintah dalam mendukung implementasi *smart city*, termasuk regulasi tentang transformasi digital dan infrastruktur perkotaan.
4. Kearifan Lokal: Peran budaya dan nilai-nilai tradisional dalam pembangunan kota pintar untuk meningkatkan keberterimaan masyarakat terhadap inovasi digital.

Karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan data sekunder, analisis dilakukan melalui:

1. Analisis Tematik: Mengkategorikan informasi dari literatur ke dalam tema utama yang relevan dengan penelitian.
2. Analisis Komparatif: Membandingkan implementasi *smart city* di berbagai kota untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan hambatan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif, yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data: Menyaring informasi yang relevan dari berbagai sumber.
2. Penyajian Data: Mengorganisasikan data dalam bentuk tabel, ringkasan tematik, dan narasi deskriptif.
3. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasikan hasil analisis untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam manajemen pembangunan kota pintar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis data sekunder untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan kota pintar yang mengintegrasikan teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal. Dengan mengkaji studi kasus implementasi *smart city* di berbagai kota di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam pembangunan kota pintar yang berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data sekunder yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep *smart city* di Indonesia memiliki variasi dalam tingkat kesiapan dan keberhasilannya. Hasil penelitian ini dikategorikan ke dalam tiga aspek utama: teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal.

Teknologi menjadi tulang punggung dalam pengembangan kota pintar. Dari berbagai studi kasus yang dianalisis, ditemukan bahwa teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran kunci dalam mendukung digitalisasi layanan publik dan meningkatkan efisiensi tata kelola kota. Beberapa temuan utama meliputi:

1. IKN Nusantara sedang dalam proses membangun infrastruktur teknologi berbasis digital untuk mendukung integrasi layanan kota pintar (Sutanto, 2022).

2. Kota Yogyakarta telah berhasil mengimplementasikan *smart city* berbasis sosial budaya melalui program Jogja Smart Service (Saputra et al., 2023).
3. Palangkaraya menunjukkan perkembangan bertahap dalam implementasi konsep *smart city* melalui masterplan yang telah disusun dengan dukungan Kementerian Kominfo (Ningsih, 2024).
4. Tanjung Pinang menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan berbagai inisiatif *smart city* karena kurangnya regulasi yang kuat dan koordinasi antar pemangku kepentingan (Sholeh et al., 2024).

Regulasi yang jelas dan sinergi kebijakan antar tingkat pemerintahan menjadi faktor utama keberhasilan implementasi *smart city*. Beberapa temuan utama terkait kebijakan publik dalam studi ini adalah:

1. IKN Nusantara berlandaskan UU No. 3 Tahun 2022, yang memberikan landasan hukum bagi pengembangan kota pintar sebagai ibu kota baru (Sutanto, 2022).
2. Yogyakarta dan Palangkaraya telah memiliki regulasi khusus terkait *smart city*, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan di lapangan, terutama dalam aspek pemerataan akses layanan digital.
3. Pemerintah Desa mendapatkan peran lebih besar dalam membangun smart village pasca UU No. 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan luas bagi desa dalam mengelola pembangunan digital mereka (Sanur, 2023).

Integrasi antara teknologi dan budaya menjadi tantangan besar dalam pembangunan kota pintar. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa daerah telah menerapkan konsep *smart city* yang mempertahankan nilai-nilai lokal:

1. Kota Yogyakarta berhasil mengadopsi teknologi tanpa meninggalkan identitas budaya melalui kebijakan pelayanan publik berbasis sosial-kultural (Wibisono & Handoko, 2020).
2. Kota Semarang mengembangkan konsep smart tourism berbasis halal tourism, yang mengoptimalkan kearifan lokal sebagai daya tarik utama (Aulia et al., 2024).
3. Kalurahan Panggunharjo di Bantul memanfaatkan Sistem Informasi Desa (SID) untuk mendukung digitalisasi layanan desa tanpa menghilangkan identitas dan budaya lokal (Sulistiyowati et al., 2023).

Berdasarkan data yang dianalisis, terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan *smart city* di Indonesia:

1. Kesiapan Infrastruktur Digital
 - Tidak semua kota memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai untuk mendukung digitalisasi layanan publik. Kota seperti Palangkaraya dan Tanjung Pinang masih menghadapi keterbatasan dalam konektivitas internet dan integrasi layanan digital (Ningsih, 2024; Sholeh et al., 2024).
 - Meskipun beberapa kota telah menerapkan *smart city*, aksesibilitas layanan masih menjadi tantangan. Contohnya, Jogja Smart Service telah menyediakan berbagai layanan berbasis digital, tetapi adopsi oleh masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu (Saputra et al., 2023).
2. Kesenjangan Sosial dan Digital
 - Pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur membawa dampak sosial yang signifikan, termasuk potensi urbanisasi masif dan kesenjangan sosial antara penduduk lokal dan pendatang (Sutanto, 2022).
 - Kurangnya literasi digital di masyarakat menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam *smart city*, terutama di daerah perdesaan dan kota-kota dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

3. Fragmentasi Kebijakan
 - Banyak kota di Indonesia belum memiliki regulasi yang kuat dalam mendukung *smart city*, seperti yang terjadi di Kota Tanjung Pinang (Sholeh et al., 2024).
 - Tidak adanya standar nasional yang jelas dalam pengembangan kota pintar menyebabkan implementasi *smart city* di setiap daerah berbeda-beda dan kurang terkoordinasi.
4. Tantangan Integrasi Budaya dan Teknologi
 - Kota-kota dengan budaya yang kuat seperti Yogyakarta dan Semarang berusaha mengintegrasikan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan modernisasi dengan tradisi (Wibisono & Handoko, 2020; Aulia et al., 2024).

Meskipun terdapat tantangan, penelitian ini juga menemukan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi *smart city* di Indonesia:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Publik
 - Pemerintah dapat menyusun kebijakan nasional yang lebih terintegrasi untuk mendukung pembangunan *smart city*, termasuk standar implementasi dan regulasi yang mendorong kolaborasi antar daerah.
2. Peningkatan Literasi Digital dan Kesiapan SDM
 - Pelatihan dan edukasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi digital sangat penting untuk meningkatkan efektivitas *smart city*.
 - Program literasi digital di daerah perdesaan seperti yang diterapkan melalui Sistem Informasi Desa (SID) di Yogyakarta dapat menjadi model bagi kota-kota lain (Sulistyowati et al., 2023).
3. Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan
 - Keberhasilan *smart city* di berbagai kota di dunia menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan. Contohnya, keterlibatan pemerintah dan komunitas dalam pengembangan desa pintar telah meningkatkan kemandirian desa (Hayati, 2021).
4. Integrasi Teknologi dengan Kearifan Lokal
 - Kota-kota yang memiliki nilai budaya yang kuat dapat mengembangkan strategi *smart city* berbasis sosial budaya, seperti yang dilakukan Kota Yogyakarta dan Semarang.
 - Model *smart tourism* berbasis budaya lokal yang diterapkan di Kota Semarang dapat diadopsi oleh daerah lain untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata (Aulia et al., 2024).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan *smart city* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam kesiapan infrastruktur, kesenjangan digital, dan regulasi yang belum terintegrasi. Namun, terdapat peluang besar untuk mengembangkan konsep *smart city* yang berbasis pada sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi *smart city*, strategi utama yang perlu diterapkan meliputi penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan integrasi budaya dalam pengembangan kota pintar.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pentingnya sinergi antara teknologi, kebijakan publik, dan kearifan lokal dalam manajemen pembangunan kota pintar di Indonesia. Berdasarkan analisis data sekunder, ditemukan bahwa implementasi *smart city* di berbagai kota di Indonesia masih

menghadapi tantangan signifikan, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan.

Dari segi teknologi, pemanfaatan infrastruktur digital dan sistem informasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi tata kelola kota, seperti yang telah diterapkan di Kota Yogyakarta dan Palangkaraya. Namun, kesiapan infrastruktur digital masih menjadi kendala di beberapa daerah, terutama dalam hal pemerataan akses dan adopsi teknologi oleh masyarakat.

Dalam aspek kebijakan publik, peran regulasi yang jelas dan dukungan pemerintah sangat menentukan keberhasilan implementasi *smart city*. Studi kasus menunjukkan bahwa kota-kota dengan kebijakan yang terintegrasi, seperti Yogyakarta dan Palangkaraya, cenderung memiliki ekosistem *smart city* yang lebih berkembang dibandingkan dengan kota-kota yang masih menghadapi fragmentasi kebijakan, seperti Tanjung Pinang.

Sementara itu, kearifan lokal menjadi elemen kunci dalam meningkatkan keberterimaan masyarakat terhadap digitalisasi layanan publik. Kota-kota seperti Yogyakarta dan Semarang telah berhasil mengintegrasikan nilai budaya dalam konsep *smart city*, yang berkontribusi pada keberlanjutan sosial dan ekonomi kota.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan kota pintar di Indonesia harus dilakukan melalui pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mengutamakan teknologi, tetapi juga memperkuat aspek regulasi dan nilai-nilai lokal. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi *smart city*, diperlukan strategi yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, kolaborasi multi-stakeholder, serta pengembangan teknologi yang adaptif terhadap kearifan lokal.

5. DAFTAR PUSTAKA

Arifin, P., & Ardiansyah, N. N. (2020). Penerapan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 6(1), 56-72. <https://doi.org/10.20885/jkp.vol6.iss1.art5>

Hayati, K. (2021). Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Sinergisitas dengan BUMDes dan Desa Pintar (Smart Village). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Desa*, 10(2), 87-104. <https://doi.org/10.21009/jbmd.v10i2.345>

M. Edi Saputra, Agnes Chandra Kirana, Rama Danti, Firdausy Andika Wighuna, Puji Lestari, & Baby Ana Retno Utami. (2023). Penyusunan Instrumen Kebijakan *Smart city* (Studi Program Jogja Smart Service Di Kota Yogyakarta). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 23-29. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.148>

Pratama, S. P., & Maulida, S. (2021). Strategi Pengembangan Industri Kreatif di Era Digital pada Subsektor Kuliner dalam Sinergi Menuju Smart Economy Kota Banjarmasin. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 15(3), 54-68. <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.1521>

Rahman, A. A., Kusumastuti, A., Ulla R.J, W. A., & Listiani, W. (2021). Pengembangan Pariwisata Halal di Semarang dengan Mengoptimalkan Kearifan Lokal melalui Konsep Smart Tourism. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 220-237. <https://doi.org/10.14710/djieb.20243>

Rilansari, V., & Saputri, C. A. A. (2022). Identifikasi Kemajuan Penerapan Konsep Kota Cerdas di Kota Yogyakarta. *Jurnal Tata Kota Indonesia*, 9(4), 112-129. <https://doi.org/10.26418/jtki.v9i4.312>

Sanur, D. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Pengembangan Desa Mandiri*, 7(1), 98-113. <https://doi.org/10.14203/jpdm.v7i1.250>

Saputra, M. E., Kirana, A. C., Danti, R., Wighuna, F. A., Lestari, P., & Utami, B. A. R. (2023). Penyusunan Instrumen Kebijakan *Smart city* (Studi Program Jogja Smart Service di Kota Yogyakarta). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 23-29. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.148>



Sholeh, C. R., Firman, F., Azizi, O. R., & Hafifa, N. (2024). Strategi dan Kapasitas Inovasi Kebijakan *Smart city* di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 5(2), 236-254. <https://doi.org/10.46730/japs.v5i2.145>

Sulistyowati, F., Tyas, H. S., Dibyorini, M. C. R., & Puspitasari, C. (2023). Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Mewujudkan Smart Village di Kalurahan Panggunharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta. *Jurnal Inovasi Desa*, 8(2), 178-192. <https://doi.org/10.21664/jid.v8i2.321>

Sutanto, H. P. (2022). Transformasi Sosial Budaya Penduduk IKN Nusantara. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 1(1), 43–56. <https://doi.org/10.21787/jskp.1.2022.43-56>

Wibisono, B. S., & Handoko, S. (2020). Program Jogja *Smart city* dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Sosio-Kultural. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(1), 70-85. <https://doi.org/10.32582/jk.v4i1.202>

Widyastuti Ningsih, E. (2024). Evaluasi Pelaksanaan *Smart city* di Kota Palangkaraya. *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 2017-2032. <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.3281>